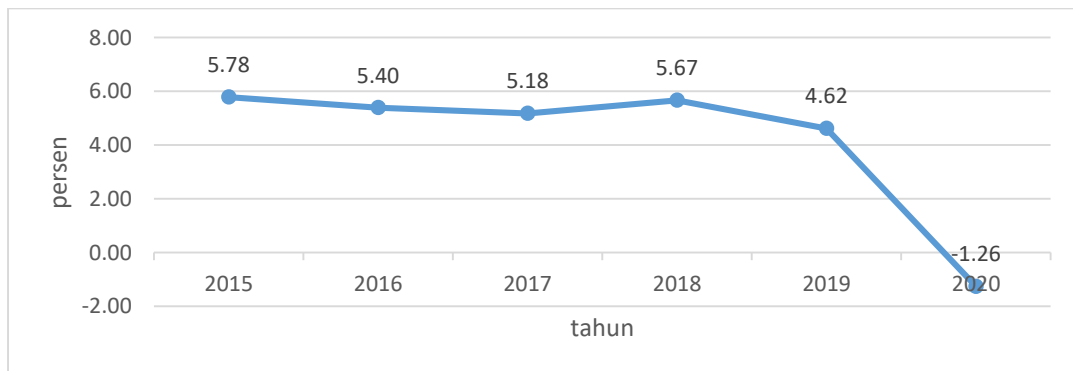


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasca krisis ekonomi pada tahun 1997, Indonesia membuat suatu kebijakan di berbagai sektor dalam hal pengawasan. Selain itu, terjadi perubahan kebijakan ditingkat pemerintah daerah dengan diterbitkannya Undang-undang otonomi daerah yang berisi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri untuk kepentingan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan anggaran daerah dan bukan dari anggaran pemerintah pusat. Dengan rancangan Undang-undang tersebut diharapkan setiap daerah untuk membuat suatu perencanaan investasi serta dapat mengembangkan daerahnya sendiri, sehingga pertumbuhan ekonomi regional dapat tercapai secara optimal. Salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara regional adalah di sektor keuangan (Nurcholis, 2009).



Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Tahun 2015-2020 di Indonesia

(Sumber data: BPS 2015-2020)

Gambar grafik 1.1 merupakan data laju rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berdasarkan PDRB. Berdasarkan gambar grafik diatas menjelaskan bahwa terjadi penurunan dari 5,78 persen sampai 5,18 persen di tahun 2015 sampai 2017 hingga mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 5,67 persen, akan tetapi mengalami penurunan yang lumayan jauh di tahun 2020 menjadi -1,26 persen, hal tersebut terjadi disebabkan penurunan pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang disebabkan adanya pandemi covid 19 yang terjadi Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) artinya salah satu indikator yang amat penting dalam pertumbuhan ekonomi pada Indonesia.

Dalam sistem keuangan pasti memiliki peran yang sangat krusial pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. peran tersebut harus berjalan dengan baik, karena selain bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, sistem keuangan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih tepatnya, sektor keuangan bisa memobilisasi tabungan atau aset. Mereka menyediakan para peminjam banyak sekali instrumen keuangan menggunakan kualitas tinggi dan mempunyai resiko rendah. Hal ini akan menambahkan investasi dan akhirnya mampu meningkatkan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, terjadinya *asymmetric information*, yang dimanifestasikan dalam bentuk tingginya biaya informasi pada pasar keuangan, bila sektor keuangan berfungsi secara efisien (Levine, 1997).

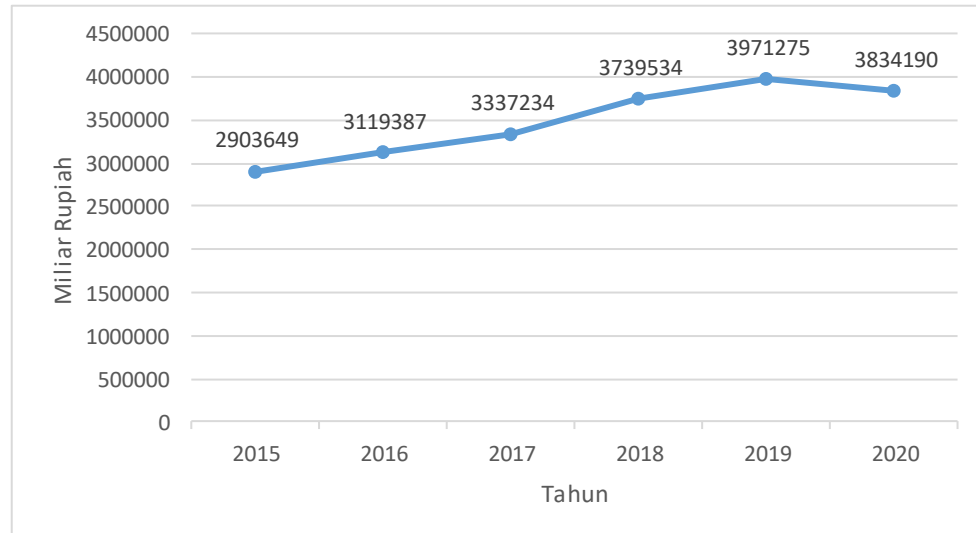
Pada pembiayaan disuatu lembaga keuangan menuntut adanya peningkatan dari sektor produksi, hal tersebut dilakukan supaya mampu peningkatan produktivitas yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Patrick (1966), dan Levine (1997), serta masih banyak studi lainnya yang memberikan keterkaitan yang lumayan erat antara perkembangan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya pengembangan pada sektor keuangan adalah melalui memperluas akses buat

keuangan. Dengan demikian, adanya memperluas akses keuangan kepada masyarakat agar dapat terjadinya peningkatan produktivitas akan terjadi pada lingkup yang lebih luas. Oleh sebab itu, percepatan pertumbuhan ekonomi yang dapat tercipta akan di ikuti pula dengan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Untuk memperluas akses lembaga keuangan pada indonesia dikemas pada program keuangan inklusif.

Program keuangan inklusi Indonesia juga di latar belakang dengan masih rendahnya aksesnya rakyat di jasa lembaga keuangan. Indeks keuangan inklusif atau *financial inclusion* indonesia masih rendah merupakan salah satu pertanda lemahnya akses rakyat terhadap lembaga keuangan. Sesuai dengan Survei Nasional dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan Indeks Literasi Keuangan sebesar 38,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 79,19 persen pada tahun 2019. Angka ini meningkat dari survei OJK 2016, dengan indeks literasi 29,7 persen dan indeks inklusi keuangan 67,8 persen. Akibatnya, pemahaman keuangan masyarakat (tingkat literasi) meningkat 8,33 persen dan akses ke produk dan layanan keuangan (inklusi keuangan) meningkat 8,39 persen selama tiga tahun terakhir. Sistem keuangan ini masih pada dominasi perbankan, pendalaman inklusi keuangan sudah menjadi rencana nasional hal ini adalah suatu platform untuk menyediakan kehidupan lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan gambar 1.2, jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum secara keseluruhan selama 6 tahun dari tahun 2015 sampai 2020. Hal ini menjelaskan pada tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah kredit yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar 1.067,626 triliun akan tapi pada tahun 2020 jumlah kredit mengalami penurunan sebesar 137,085 triliun. Hal ini, tentunya akan menaikkan pentingnya upaya perbankan dalam membuat rancangan serta membangun konsep

yang lebih luas terkait dengan kredit yang memungkinkan semua lapisan masyarakat bisa menikmati manfaat dari jasa keuangan.



Gambar 1.2. Total Kredit Bank Umum Tahun 2015-2020 dalam Per Provinsi di Indonesia

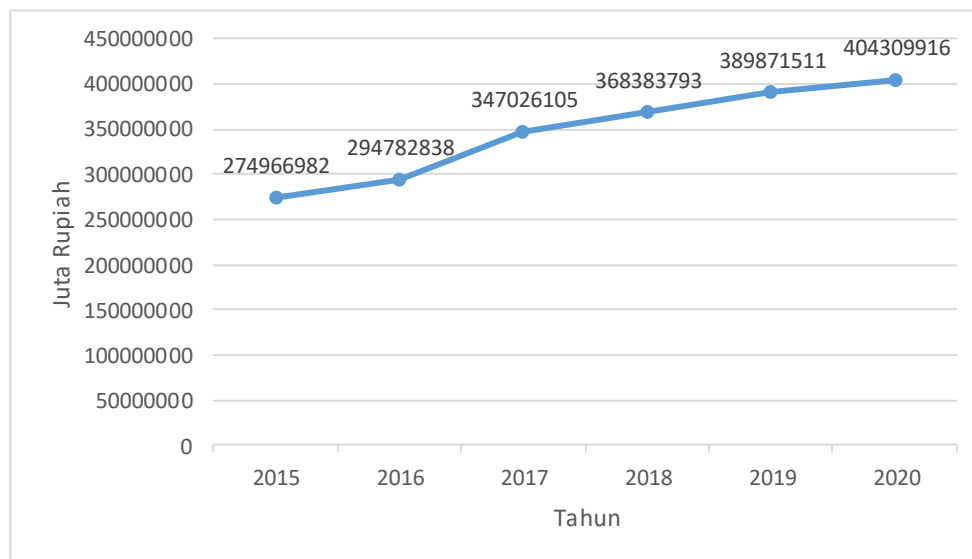
(Sumber: OJK 2015-2020)

Dengan adanya keterbukaan akses terhadap layanan keuangan dan masyarakat akan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pendapatannya melalui pinjaman kredit untuk kegiatan produktif. Sebab kurangnya akses ke layanan keuangan akan menyebabkan ketimpangan pendapatan dan memperlambat pembangunan ekonomi regional (Allen, dkk 2012).

Hal ini karena masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke bank harus mengandalkan tabungan untuk berinvestasi, sedangkan pengusaha kecil harus mengandalkan keuntungan untuk kelangsungan usaha, sehingga memperlambat kinerja ekonomi. Dengan mempermudah akses jasa keuangan maka secara tidak langsung masyarakat bisa membuka usaha dan membuka lapangan pekerjaan sekaligus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tiap daerah di Indonesia.

Di sini peran pemerintah dalam mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat dan pihak swasta membantu pemerintah untuk mencapai hal tersebut sangat besar. Fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dll sangat bergantung pada jumlah dana yang dimilikinya. Tidak ada kegiatan tanpa penggunaan dana dan pelayanan pemerintah. Dana tersebut berasal dari pajak, retribusi, kekayaan, keuntungan dari BUMN/BUMD dan pendapatan lain yang sah.

Pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan pemerintah karena semua kehidupan bergantung pada pajak. Selain sumber-sumber tersebut, dana pemerintah daerah menerima sumbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer pendapatan, antara lain bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, penerimaan DAU, dan alokasi khusus (DAK) penghasilan adalah pemerintah daerah, selain mendapatkan dan memanfaatkan potensi daerah, pemerintah daerah juga menerima sumbangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus mengalokasikan pendapatan secara tepat ke belanja untuk mencapai anggaran berimbang. Aturan itu sendiri menyiratkan rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk keuangan yang memiliki skala pasti dan ada pada saat direalisasikan. Anggaran harus mencerminkan kegiatan apa yang dilakukan, berapa banyak yang didanai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.



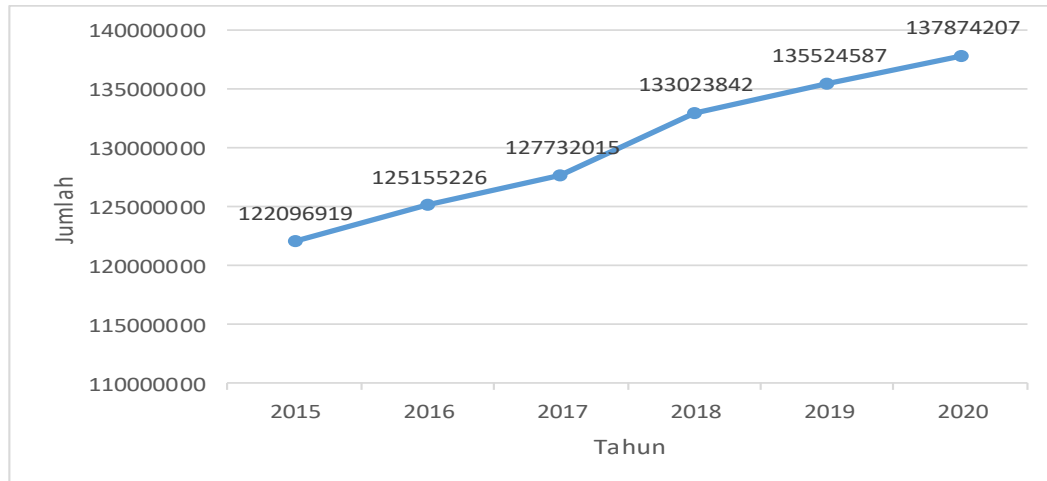
Gambar 1.3. Total Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015-2020 di Indonesia

(Sumber: BPS 2015-2020)

Gambar grafik 1.3 merupakan data jumlah APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) dari tahun 2015 sampai 2020. Data tersebut menjelaskan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terus mengalami kenaikan setiap tahun sebesar sekitar 129 triliun tidak seperti laju rata-rata pertumbuhan ekonomi yang selalu mengalami naik turunnya di tahunnya. Pada era globalisasi ini, peran modal manusia dibutuhkan dalam mendukung pengembangan kegiatan ekonomi di Indonesia, kemampuan pada menyebarkan sumber daya manusianya khususnya pada menyediakan energi kerja yang relatif terampil di banyak sekali bidang yang bisa menjadi kunci buat kesuksesan suatu kebijakan ekonomi.

Modal manusia merupakan seperangkat sumber daya dimana menggabungkan pengetahuan, pembinaan dan keterampilan menggunakan kualitas pendidikan serta pertumbuhan ekonomi (Islam, dkk 2016). Pada peningkatan output suatu negara tidak hanya diukur menggunakan modal, sumber daya, dan kemajuan

teknologi namun juga pertumbuhan produktivitas. Produktivitas sendiri adalah rasio antara keluaran dibandingkan dengan output. Produktivitas artinya jumlah total barang dan jasa pada produksi pekerja pada setiap jam kerja. Indonesia menjadi negara berkembang berada pada peringkat keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia yang mempunyai kesempatan untuk mengoptimalkan modal manusia yang ada buat meningkatkan produktivitas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Menjadi salah satu negara menggunakan populasi terbanyak maka Indonesia mempunyai keuntungan pada jumlah tenaga kerja.



Gambar 1.4. Total Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2015-2020 di Indonesia
(Sumber: BPS 2015-2020)

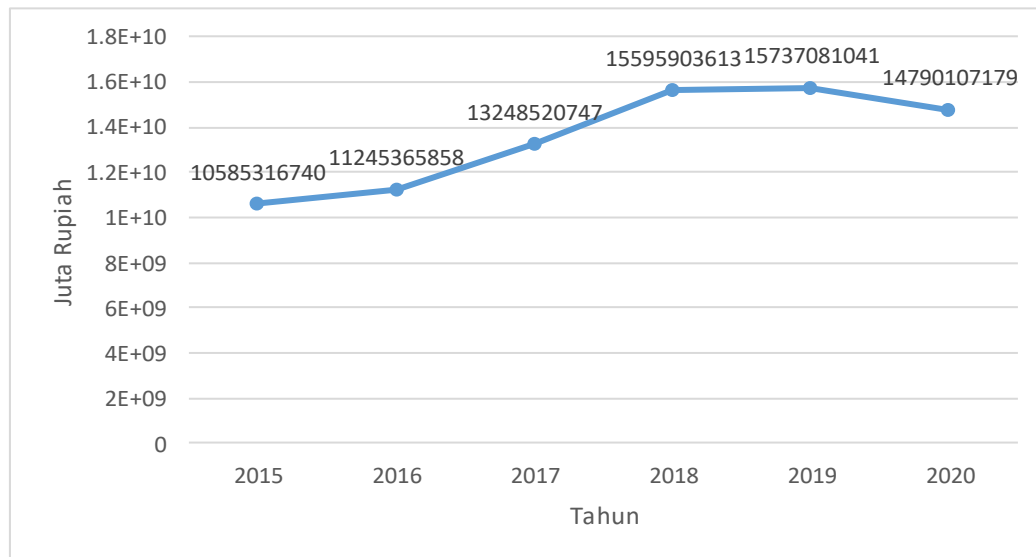
Gambar grafik 1.4 merupakan data total jumlah angkatan kerja di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2020. Data tersebut menjelaskan bahwa ditahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar sekitar 15 juta dan berbeda dari gerakan grafik rata-rata laju pertumbuhan ekonomi. Meskipun begitu pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia

mengalami pandemi covid 19 sehingga banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan penghematan biaya produksi.

Dengan adanya peran sektor keuangan atau keterbukaan akses keuangan yang berupa penyaluran kredit kepada para pengusaha dan para pelaku UMKM dalam membantu dari segi permodalan agar bisa memperluas perdagangan mereka. Maka sebab itu, selain peran sektor keuangan ada juga peran dari perdagangan ekspor dan impor yang dapat menunjang pendapatan mereka sehingga bisa mendorong perekonomian di masing-masing daerah. Seiring adanya era globalisasi yang dapat menjadi tantangan bagi semua daerah yang ada di Indonesia dengan menuntut keterbukaan ekonomi yang semakin luas.

Keterbukaan ekonomi dapat memberikan peluang untuk mengekspor barang-barang yang faktor-faktor produksinya menggunakan sumber daya yang melimpah dan untuk mengimpor barang-barang murah atau mahal yang diproduksi di dalam negeri. Dari perspektif teori pertumbuhan ekonomi modern, keterbukaan ekonomi dapat dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam bentuk kegiatan ekspor impor (Pridayanti, 2019).

Pada gambar 1.5 merupakan data penjumlahan ekspor dan impor dari masing-masing daerah secara keseluruhan. Dari data tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar di kisaran 5.151 triliun dan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 949,97 triliun. Hal tersebut beriringan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 yang disebabkan krisis covid 19.



Gambar 1.5. Jumlah Ekspor Impor Tahun 2015-2020 di Indonesia
(Sumber: BPS 2015-2020)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nursechafia dan Sanjaya (2016), menjelaskan bahwa hasil di penelitian ini menyatakan bahwa kelompok rakyat miskin tidak sepenuhnya menggunakan jasa keuangan formal khususnya kredit. Sehingga, pengambil kebijakan perlu dilakukan adalah menaikkan ketersediaan jumlah kantor bank dan jumlah orang dewasa serta penggunaan jasa keuangan menggunakan harga terjangkau khususnya bagi warga miskin. Buat menjembatani riset gap, penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tiap provinsi di Indonesia yang akan melibatkan APBD per provinsi, angkatan kerja per provinsi serta ekspor impor dan pandemi covid 19 tiap provinsi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah peran sektor keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi Indonesia?
2. Apakah peran APBD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi Indonesia?
3. Apakah angkatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi Indonesia?
4. Apakah ekspor impor berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi Indonesia?
5. Apakah covid 19 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh angkatan kerja terhadap laju pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh covid 19 terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi Indonesia

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat secara teoritis: dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan serta gambaran tentang peran sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi.
2. Manfaat secara praktis: dengan adanya penelitian ini diperlukan pemerintah bisa memberikan sebuah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi di Indonesia, serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.